

**PROSEDUR PENERIMAAN IURAN WAJIB PEGAWAI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI PADA
PT TASPEN (PERSERO) KC DENPASAR**



**Oleh
Mellani Oka Putri
NIM 2215713210**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2025**

**PROSEDUR PENERIMAAN IURAN WAJIB PEGAWAI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI PADA
PT TASPEN (PERSERO) KC DENPASAR**



**Oleh
Mellani Oka Putri
NIM 2215713210**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
202**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PROJEK AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Lokasi Penelitian	8
2. Objek Penelitian	8
3. Data Penelitian	8
a. Jenis Data Penelitian	8
b. Sumber Data Penelitian	9
c. Metode Pengumpulan Data	9

4. Metode Analisis Data.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Manajemen Keuangan Daerah	15
B. Prosedur.....	22
C. Iuran Wajib Pegawai (IWP)	24
D. Flowchart.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah Berdirinya.....	34
B. Bidang Usaha.....	38
C. Struktur Organisasi	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kebijakan Perusahaan	50
B. Analisis Dan Interpretasi Data.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
A. Simpulan	78
B. Saran	80

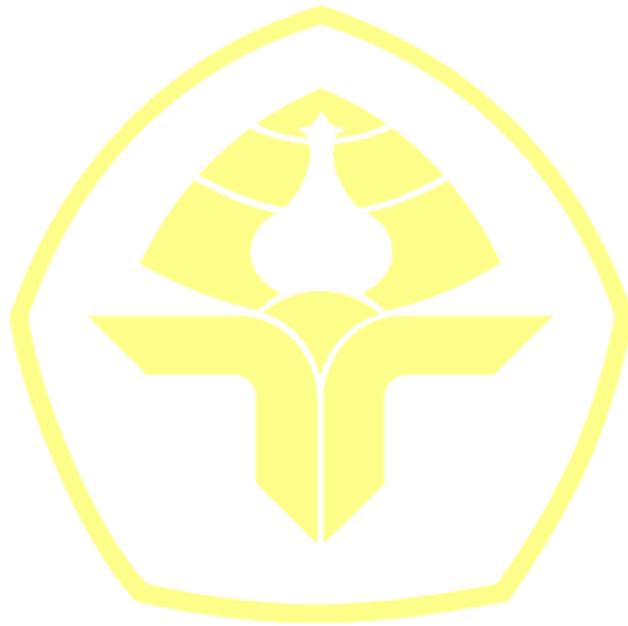
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kabupaten Provinsi Bali.....	3
Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Pada Diagram Alir (Flowchart).....	32



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT Taspen (Persero)	37
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar	44
Gambar 4. 1 Menu SAP	59
Gambar 4. 2 Voucher Piutang	60
Gambar 4. 3 Menu Pengumpulan Data aplikasi TDES	62
Gambar 4. 4 Menu Rekon DBI Dan SSBP	63
Gambar 4. 5 Surat Konfirmasi SPS (Surat Pelimpahan Setoran)	65
Gambar 4. 6 Voucher Pelimpahan	66
Gambar 4. 7 Estimasi Iuran	67
Gambar 4. 8 Koreksi Estimasi	68
Gambar 4. 9 Voucher Koreksi	69
Gambar 4. 10 Surat Tagihan Pemda	70
Gambar 4. 11 Prosedur Penerimaan Awal Bulan IWP Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar	72
Gambar 4. 12 Prosedur Penerimaan Akhir Bulan IWP Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan wawancara Informan 1

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara Informan 2

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Informan 1

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan 2

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Informan 1

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Informan 2

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Dospem 1

Lampiran 8 Lanjutan Kartu Bimbingan Dospem 1

Lampiran 9 Kartu Layak Uji Dospem 1

Lampiran 10 Kartu Bimbingan Dospem 2

Lampiran 11 Kartu Layak Uji Dospem 2



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT TASPEN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Indonesia, program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah daerah dikelola oleh PT Taspen (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola dana pensiun dan memberikan manfaat pensiun kepada peserta. Dalam menjalankan fungsinya, PT Taspen (Persero) mengelola beberapa program perlindungan sosial, yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM). Keempat program tersebut memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda. Program THT dan Program Pensiun merupakan program

yang sumber dananya berasal dari iuran wajib peserta (PNS/ASN), sedangkan Program JKK dan JKM dibiayai oleh pemberi kerja, yakni instansi pemerintah pusat maupun daerah. Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun memiliki iuran yang wajib disetor oleh peserta atau PNS (Taspen, 2025).

Berdasarkan Dasar hukum penyelenggaraan program ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan bahwa peserta maupun instansi wajib menyetorkan iuran sebesar 8% dari penghasilan bulanan, yaitu dari gabungan gaji pokok dan tunjangan keluarga, setelah dikurangi dengan tunjangan pangan. Iuran tersebut terbagi menjadi dua komponen, yaitu 3,25% untuk Program Tabungan Hari Tua (THT) dan 4,75% untuk Program Pensiun. Penyetoran iuran ini dilakukan melalui mekanisme potongan otomatis dari Surat Perintah Membayar (SPM) gaji yang termasuk dalam kategori Potongan Pihak Ketiga (PFK) dan dikenal secara administratif sebagai Iuran Wajib Pegawai (IWP).

Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan dan penerimaan dana PFK tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga, serta Permenkeu Nomor 212/PMK.05/2020 sebagai perubahan atas

peraturan sebelumnya. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) merupakan salah satu pihak ketiga yang berwenang dan berhak menerima dana hasil potongan IWP yang mencakup iuran pensiun dan tabungan hari tua.

Di Provinsi Bali, kewajiban tersebut dilaksanakan oleh sepuluh pemerintah daerah, yang terdiri dari sembilan kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi. Seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk secara rutin menyetorkan IWP pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar. Berikut adalah tabel pemda yang membayarkan IWP kepada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar:

Tabel 1.1 Kabupaten Provinsi Bali

No	Nama Kabupaten
1	Pemprov Bali
2	Jembrana
3	Tabanan
4	Badung
5	Gianyar
6	Klungkung
7	Bangli
8	Karangasem
9	Buleleng
10	Pemkot Denpasar

Sumber: PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar

Berdasarkan Tabel 1.1 Ada sembilan kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi yang melakukan pembayaran IWP, yang menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa seluruh proses penerimaan IWP dari seluruh Pemda se-Bali tersebut hanya ditangani oleh dua orang staf di bagian administrasi keuangan dan juga bagian Kepesertaan PT Taspen KC Denpasar. Kondisi ini menciptakan beban kerja yang sangat tinggi bagi keduanya, terlebih cakupan wilayah yang luas dan jumlah transaksi yang besar membutuhkan tingkat efisiensi kerja yang tinggi, ketelitian dalam setiap detail administrasi, serta kemampuan multitasking dan koordinasi lintas instansi yang baik. Kedua staf tersebut harus memastikan bahwa seluruh proses penyetoran berjalan tepat waktu, nominal sesuai dan dokumen lengkap.

Fakta ini menunjukkan adanya tantangan nyata dalam pengelolaan penerimaan IWP, di mana tingginya beban administrasi dan kompleksitas sistem tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia di PT Taspen (Persero) KC Denpasar. Meskipun demikian, PT Taspen tetap dituntut untuk menjaga mutu layanan, menjamin hak peserta, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme prosedur dilaksanakan secara efektif, serta bagaimana upaya yang dilakukan

oleh pihak Taspen dalam menjaga ketepatan, akurasi, dan akuntabilitas dalam dana iuran dari seluruh pemerintah daerah Se-Bali.

Dalam Penelitian sebelumnya oleh (Manambe, 2022) mengenai prosedur penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP) pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado, penelitian tersebut memiliki keterbatasan ruang lingkup karena hanya berfokus pada satu wilayah dan dilakukan dalam konteks kerja praktik. Pendekatannya lebih bersifat deskriptif sederhana dan tidak mendalami aspek manajerial serta tantangan sumber daya manusia secara sistematis.

Sementara itu, Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan cakupan yang lebih luas, yaitu seluruh pemerintah daerah se-Bali. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan prosedur penerimaan IWP, tetapi juga menyoroti efektivitas pelaksanaan prosedur, beban kerja tinggi yang dihadapi oleh staf. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memahami sistem administrasi penerimaan IWP di lingkungan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar, yang belum terbahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam bagaimana prosedur Penerimaan Iuran Wajib pegawai yang dilakukan di PT. Taspen (Persero) KC Denpasar. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan ini dalam bentuk tugas akhir

dengan judul “Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT. Taspen (Persero) KC Denpasar”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya maka, pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam Melaksanakan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar.
2. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Melaksanakan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai mahasiswa untuk menambah wawasan dan pemahaman praktis mengenai prosedur penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP) di lingkungan PT Taspen (Persero).

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan studi serupa atau mengembangkan topik terkait Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar. Dengan adanya penelitian ini, kampus dapat memperkaya koleksi literatur dan bahan ajar yang berkaitan dengan Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi PT TASPEN (Persero) KC Denpasar dalam menilai efektivitas sistem dan mekanisme penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP) dari pemerintah daerah Provinsi Bali.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar, yang beralamat di Jl. Raya Puputan No.21 Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80234, Telp (0361) 231418 dan email tspdenpasar@taspen.co.id

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

Adapun Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data penelitian Kualitatif. Data Kualitatif adalah jenis data yang berbentuk deskriptif dan biasanya tidak dapat diukur menggunakan angka secara langsung. Data ini digunakan untuk memahami karakteristik, sifat, pendapat, pengalaman, atau fenomena tertentu yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Data kualitatif sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh.

b. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:137) dijelaskan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu dengan menanyakan langsung kepada Karyawan atau pihak berwenang pada saat melakukan penelitian pada PT TASPEN (PERSERO) Cabang Denpasar.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:137) dijelaskan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak Langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu buku serta dokumen terkait yang ada pada PT TASPEN (PERSERO) Cabang Denpasar.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara yang baik dilakukan dengan face to face maupun menggunakan telepon dan akan selalu terjalin kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan Dimana harus melakukan wawancara. Wawancara penelitian ini dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang berkaitan dengan pihak yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan, yaitu dengan Staf administrasi keuangan dan juga Staf Kepesertaan PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar.

2) Observasi

Menurut Sugiyono (2016:226). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai Prosedur Penerimaan Iuran Wajib Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada PT Taspen (Persero) KC Denpasar.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dijelaskan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain lain, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

a. Metode analisis Data

Berdasarkan Permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui proses analisis yang sistematis dan terstruktur. metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman memiliki tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Langkah terakhir adalah penarikan Kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses untuk menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengeliminasi data yang dianggap tidak relevan, sehingga data yang tersisa dapat memberikan informasi yang bermakna serta memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Tahapan ini menjadi penting karena data yang diperoleh dari lapangan biasanya sangat banyak dan memiliki tingkat kompleksitas yang beragam. Oleh karena itu, reduksi data bertujuan untuk menyeleksi data berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus atau tujuan akhir penelitian.

2) Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data secara terstruktur dan sistematis agar lebih mudah dipahami, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi teks (seperti catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Melalui penyajian ini, data menjadi lebih terorganisir dan membentuk

pola hubungan yang jelas, sehingga mempermudah pemahaman terhadap informasi yang diperoleh.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Tahapan ini dilakukan dengan meninjau hasil reduksi data sambil tetap mengacu pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi hubungan, kesamaan, maupun perbedaan, sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Uji keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan (*credibility*) terhadap hasil penelitian dengan cara melakukan pemeriksaan silang atas data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber dan teknik. Dengan triangulasi, peneliti dapat menghindari bias subjektivitas dan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif terhadap fenomena yang dikaji.

Menurut Sugiyono (2017: 372–373), triangulasi terdiri dari tiga jenis utama, Meskipun terdapat beberapa metode yang tersedia, penulis hanya menerapkan dua metode dalam penelitian ini, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber atau informan. Misalnya, informasi yang diberikan oleh informan A akan dibandingkan dengan informasi dari informan B, serta diverifikasi kembali melalui dokumen resmi atau catatan tertulis. Teknik ini membantu peneliti menilai konsistensi dan keakuratan data dari berbagai sudut pandang.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pendekatan pengumpulan data menggunakan berbagai metode terhadap subjek atau objek yang sama. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh melalui wawancara akan dikonfirmasi melalui teknik observasi lapangan dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat bukti temuan dengan pendekatan yang bervariasi dan mengurangi risiko bias metode tunggal.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan

1. Prosedur penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP) di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar telah dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada ketentuan serta regulasi yang berlaku. Seluruh rangkaian proses dilakukan dengan penuh ketelitian dan akuntabilitas, dimulai dari tahap awal berupa pembuatan jurnal piutang oleh bagian Administrasi Keuangan, dilanjutkan dengan penerbitan *voucher* sebagai dasar pencatatan transaksi, pengumpulan dokumen pendukung seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), serta verifikasi dan validasi data oleh bagian terkait. Selanjutnya, dilakukan rekonsiliasi

data antara dokumen fisik dan sistem, hingga tahap akhir berupa finalisasi dan pembaruan informasi dalam sistem melalui aplikasi *SAP LOGON*. Prosedur ini dirancang untuk memastikan setiap alur administrasi berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

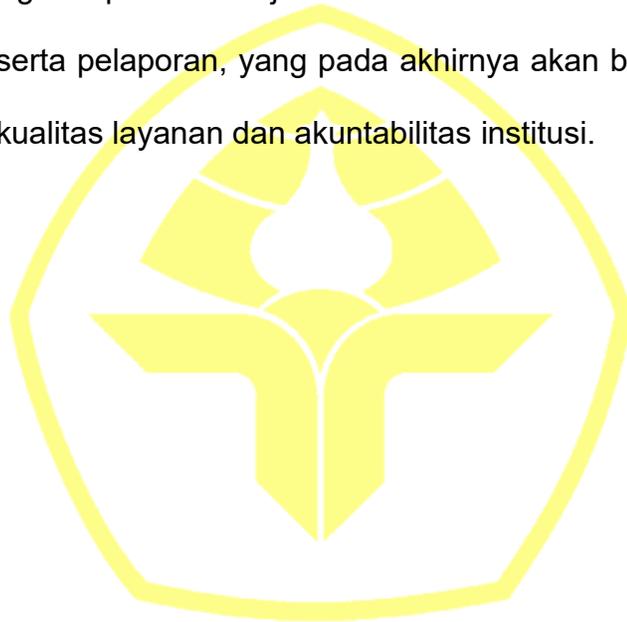
2. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP) di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Denpasar adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani proses tersebut. Saat ini, seluruh rangkaian kegiatan administratif yang kompleks hanya ditangani oleh dua orang staf, yang mengakibatkan beban kerja menjadi sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan luasnya cakupan wilayah kerja yang meliputi seluruh pemerintah daerah Provinsi Bali serta besarnya volume transaksi yang harus dikelola setiap bulannya. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan tekanan kerja, tetapi juga berpotensi menurunkan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, tantangan lainnya mencakup keterlambatan dalam penyetoran IWP oleh beberapa pemerintah daerah, ketidaksesuaian atau ketidakakuratan data yang diterima, serta kendala dalam menjalin koordinasi yang efektif antar instansi terkait, yang semuanya berdampak pada kelancaran dan akurasi proses penerimaan iuran.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Karena hingga saat ini belum tersedia prosedur flowchart yang secara detail mengatur mekanisme penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP), dan proses yang berlangsung masih berjalan secara sistematis namun belum terdokumentasi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang terstruktur, maka peneliti mengambil langkah untuk menyusun sebuah prosedur flowchart sebagai rancangan awal dari prosedur operasional tersebut. Penyusunan prosedur flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan runtut setiap tahapan dalam proses penerimaan IWP. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan alur penerimaan iuran dapat terdokumentasi secara jelas, dapat dilampirkan secara formal, serta mendukung terciptanya standar kerja yang efektif dan efisien.
2. Penambahan jumlah sumber daya manusia menjadi langkah yang sangat krusial untuk dilakukan, terutama pada bagian Administrasi Keuangan dan Kepesertaan, mengingat beban kerja yang tinggi dan kompleksitas tugas yang dihadapi dalam proses penerimaan Iuran Wajib Pegawai (IWP). Ketersediaan tenaga kerja tambahan akan memungkinkan distribusi tugas yang lebih proporsional di antara staf,

sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan akibat beban yang berlebihan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, setiap tahapan administrasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, penambahan personel juga dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika jumlah transaksi dan mempercepat proses verifikasi serta pelaporan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas layanan dan akuntabilitas institusi.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil*. www.peraturan.bpk.go.id. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66322/pp-no-25-tahun-1981>).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003*. www.peraturan.bpk.go.id. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/32159/UU%20Nomor%2019%20Tahun%202003.pdf>).

Dahlan, M. (2021). *Kapasitas Fiskal Daerah dan Dampaknya pada Pembiayaan Jaminan Sosial*.

Manambe, R. I. . & hondandar. (2022). *Prosedur Penerimaan Premi Iuran Wajib Pegawai (Iwp) 8% Pns Daerah Pada Pt Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado Kerja Praktik*.

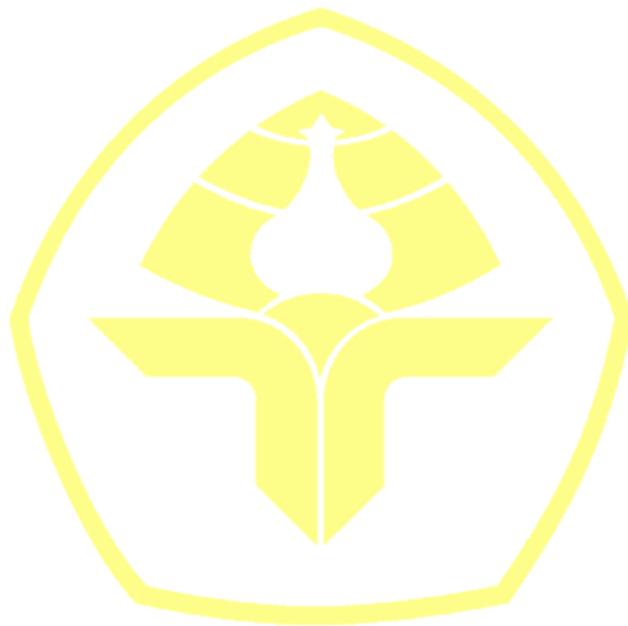
sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Taspen, P. (2025). *Pengertian Taspen*. [https://taspen.co.id/tentang-](https://taspen.co.id/tentang-taspen/profil-perusahaan)

[taspen/profil-perusahaan](https://taspen.co.id/tentang-taspen/profil-perusahaan)



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI